



Empat Pasangan Resmi Bertarung

Pilkada Yogyakarta dan Kulonprogo Diikuti Masing-Masing Dua Pasangan Calon

YOGYAKARTA – KPU Yogyakarta dan Kulonprogo resmi menetapkan masing-masing dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada 2017 mendatang.

Di Yogyakarta, Haryadi Suyuti berpasangan dengan Heroe Purwadi dan Imam Priyono Dwi Putranto dengan Achmad Fadli. Kedua pasangan ini resmi ditetapkan sebagai paslon dalam Pilwali Yogyakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Haryadi Suyuti merupakan petahana wali kota, sementara Imam Priyono merupakan petahana wakil wali kota.

Pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi diusung enam partai politik (parpol) yang total

memiliki 24 kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Keenam parpol tersebut, yakni Partai Golkar (5 kursi), PAN (5 kursi), Gerindra (5 kursi), PKS (4 kursi), PPP (4 kursi), dan Demokrat (1 kursi). Sementara pasangan Imam Priyono-Achmad Fadli diusung tiga parpol yang memiliki 16 kursi di DPRD Yogyakarta. Ketiga parpol tersebut, yaitu PDIP (15 kursi), Nasdem (1 kursi) dan PKB.

"Hari ini kita tetapkan dua pasangan calon. Haryadi Suyuti berpasangan dengan Heroe

Tahapan pesta demokrasi di dua daerah di DIY memasuki penetapan pasangan calon (paslon). KPU Yogyakarta resmi menetapkan paslon Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi dan Imam Priyono Dwi Putranto-Achmad Fadli. Sementara KPU Kulonprogo menetapkan paslon Hasto Wardoyo-H Sutedjo dan H Zuhadmono Azhari-Iriani Pramastuti.

Purwadi dan Imam Priyono Dwi Putranto dengan Achmad Fadli," ujar Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budi-yanto dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2017 kemarin.

Setelah penetapan itu, KPU Kota Yogyakarta akan melakukan pengundian nomor urut paslon hari ini. Semua paslon dan tim sukses diundang

luar tanggunan negara. Demikian pula dengan Achmad Fadli yang menjabat sebagai Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Ia juga belum menyerahkan surat keputusan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) ke KPU Yogyakarta.

"Bagi petahana, masih ada waktu lima hari setelah ditetapkan untuk penyerahan surat cuti. Sedangkan surat persetujuan pengunduran diri masih ada waktu 60 hari setelah ditetapkan," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budi-yanto.

Ketua Panwas Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin menga-

takan, pihaknya sudah menerima tembusan cuti di luar tanggunan negara yang diajukan paslon petahana. Sedangkan untuk paslon PNS masih dalam proses pengajuan pengunduran diri. "Kami kemarin sudah menanyakan ke bagian tata pemerintahan dan Badan Kepegawaian Daerah, informasi yang kami terima sedang diproses," katanya.

Kendati begitu, panwas akan mengirimkan surat kepada masing-masing paslon agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye nanti. Salah satunya, menurut Agus, tidak menggunakan rumah dinas maupun mobil dinas.

Sementara KPU Kulonprogo menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo yang akan bertarung dalam Pilkada pada 15 Februari 2017.

Instansi	
1.	Yogyakarta akan dimulai 28 Oktober hingga 11 Februari 2017. "Kita sudah menyiapkan mekanisme untuk pengundian calon besok. Kita lakukan secara terbuka," ujar Komisiner KPU Kota Yogyakarta Sri Surani.
2.	Kendati telah ditetapkan, tapi hingga kemarin belum ada satu pun petahana yang menyertakan surat cuti di
3.	
4.	
5.	

untuk pengundian nomor urut tersebut. Sedangkan masa kampanye Pilkada Kota Yog-

((dari Hal 1

Mereka adalah pasangan dr Hasto Wardoyo SpOG(K)-Drs H Sutedjo yang diusung PDIP, PAN, Partai Golkar, PKS, Hanura, dan NasDem. Satu lagi pasangan Drs H Zuhadmono Azhari M.PD-Iriani Pramastuti yang diusung koalisi Partai Gerindra, PKB, dan Partai Demokrat.

"Hari ini kita tetapkan dua pasangan calon, dan besok pagi (hari ini) akan dilakukan pengundian nomor," ujar Ketua KPU Kulonprogo M Isnaini dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kulonprogo 2017 kemarin.

Penetapan pasangan calon ini dihadiri Panwaslu Kulonprogo, KPU DIY, dan sejumlah tim sukses kedua pasangan calon. Termasuk ketua parpol pengusung dan sekretaris, berikut sejumlah anggota DPRD Kulonprogo.

Bagi pasangan calon yang ingin melakukan perbaikan masih ada kesempatan. Penambahan gelar pasangan masih mungkin sebelum dilakukan pengundian nomor. Salah satunya dengan mendasarkan ada surat keterangan yang bisa dijadikan dasar penggantian KTP elektronik. "Sesuai hasil konsultasi ke KPUD DIY, sebelum pengundian nomorurut bisa diperbaiki gelarnya," kata-

nya.

Anggota KPU DIY Siti Ghoniyatun mengatakan, sesuai hasil konsultasi ke KPU Pusat masih bisa dilakukan perbaikan atas nama. Salah satunya dengan mendasarkan pada KTP elektronik ataupun surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini bisa dan dibenarkan sesuai peraturan KPU. "Bisa dilakukan penggantian dengan surat keterangan," ujar Siti Ghoniyatun.

Ketua Panwas Kulonprogo Tamyus Rochman mengatakan, akan mengkaji surat edaran dari KPU Pusat yang menjaidicelah dilakukan penyempurnaan. Sesuai aturan yang ada, masa verifikasi dan perbaikan data pasangan calon sudah selesai pada 18 Oktober silam. Sesuai Pasal 70 PKPU memang bisa dilakukan perubahan. "Permasalahan ini tahapannya sudah selesai. Kita akan kaji dan koordinasi dengan Bawaslu," katanya.

Panwas juga mengingatkan kepada tim sukses agar dalam masa kampanye nanti tidak melanggar. Aturan dalam pengawasan sudah ketat dan akan dibagi dalam zonasi.

Bagi calon dan tim sukses yang keberatan bisa melapor dalam waktu maksimal tiga hari. "Kami ingatkan jangan melakukan *money politic*. Jika ada pelanggaran silakan lapor,"

tuturnya.

Ketua Tim Pemenangan pasangan Zuhadmono-Iriani (Hadir) Yusron Martofa mengaku bersyukur pasangan yang diusung bisa ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kulonprogo. Karena itulah nanti tim yang ada akan merapatkan barisan agar melakukan kampanye yang demokratis sesuai aturan.

Tim juga akan memperbaiki atas terakomodasinya kesempatan mencantumkan gelar bangsawan dan gelar agama dari pasangan yang akan diusung. Mereka segera menyiapkan surat keterangan untuk disampaikan kepada KPU. "Kita akan serahkan dokumen perbaikan, agar gelar itu terakomodir," katanya.

Sementara tim sukses pasangan Hasto-Tedjo (Sehat), Sudarto mengatakan, sudah beberapa kali mengklarifikasi menyangkut gelar agama, pendidikan, ataupun bangsawan. "Hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah," katanya.

Menurutnya, untuk pasangan Hasto-Tedjo akan sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat. Apakah memang harus menyempurnakan gelar atau tetap seperti saat ini. "Disebut Hasto atau Tedjo tidak masalah, karena itu lebih disukai masyarakat," kata Sudarto, Ketua DPC PDIP Kulonprogo ini.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005